

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENGANGGURAN, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 1986-2015

Irhanni

*Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta
irham.arewang@gmail.com*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 1986-2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder Indonesia dari tahun 1986-2015. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data *time series* dengan model OLS (*Ordinary Least Square*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan sebesar 6,257149 dalam jangka panjang. (2) Variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan sebesar 0,194924 dalam jangka panjang. (3) Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan sebesar -0,299375 dalam jangka panjang. (4) Variabel jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan dalam jangka panjang.

Kata kunci: jumlah penduduk, pengangguran, pengeluaran pemerintah, kemiskinan

THE EFFECTS OF THE TOTAL POPULATION, UNEMPLOYMENT, AND GOVERNMENT SPENDING ON THE POVERTY IN INDONESIA IN 1986-2015

Abstract: This research aimed to find out the effects of total population, unemployment, and government spending on the poverty in Indonesia in 1986-2015. This research used the quantitative approach. The data were secondary data in Indonesia from 1986 to 2015. The data analysis technique was the time series data analysis using the OLS (*Ordinary Least Square*) model. The result of the research showed that: (1) the variable of total population had a significant positive effect on the poverty by 6,257149 in the long term. (2) the variable of unemployment had a significant positive effect on the poverty by 0,194924 in the long term. (3) the variable of government spending had a significant negative effect on the poverty by 0,299375 in the long term. (4) the variables of total population, unemployment, and government spending as an aggregate affected the poverty in the long term.

Keywords: total population, unemployment, government spending, poverty

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang tidak pernah luput dari perhatian pemerintah suatu negara dibelahan dunia manapun. Kemiskinan bahkan menjadi persoalan fenomenal dalam bidang ekonomi yang menjadi titik acuan keberhasilan pemerintah negara dari waktu ke waktu, terlebih pada negara yang sedang berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara yang masuk kategori berkembang menyadari bahwa pentingnya memperhatikan masalah kemiskinan dan mengusahakan segala upaya untuk menemukannya dalam agenda tahunan

pemerintah. Bahkan menjadi *masterplan* perencanaan pembangunan dalam jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Masalah kemiskinan berkaitan mengenai pembangunan, mengingat *term* ini adalah dua sumbu yang tak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik dan terus-menerus untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan pembangunan nasional negara Indonesia sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Berbagai kegiatan pembangunan telah dilaksanakan pemerintah Indonesia demi tercapainya kesejahteraan umum. Masyarakat dapat disebut sejahtera apabila masyarakat tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Permasalahan yang dihadapi oleh banyak negara yang menyangkut kesejahteraan masyarakat adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Sri, 2010: 358-366). Kesejahteraan dapat diartikan salah satunya dengan tingkat kemiskinan penduduk. Kesejahteraan sendiri mempunyai hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan, semakin rendah tingkat kemiskinan maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk.

Badan Perencanaan Pembangunan nasional (Bappenas) pada tahun 2004 mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain: (1) terpenuhinya kebutuhan pangan; (2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan; (3) rasa aman dari perlakuan dan ancaman tindak kekerasan; (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Salah satu akar permasalahan kemiskinan yaitu jumlah penduduk yang tinggi. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang tinggi. Menurut Malthus, kenaikan jumlah penduduk yang terus-menerus merupakan unsur yang perlu untuk menunjang tambahan permintaan, namun disisi lain kenaikan jumlah penduduk yang tinggi dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2000: 236) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Menurut Maier (Kuncoro, 1997: 17) di kalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap *supply* bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia. Kenaikan jumlah penduduk tanpa disertai dengan kemajuan faktor-faktor perkembangan yang lain tentu tidak akan menaikkan pendapatan dan permintaan. Dengan demikian, tumbuhnya jumlah penduduk justru akan menurunkan tingkat upah dan berarti pula memperendah biaya produksi. Turunnya biaya produksi akan memperbesar keuntungan-keuntungan para kapitalis dan mendorong mereka untuk terus berproduksi. Tetapi keadaan ini hanya sementara sifatnya,

sebab permintaan efektif (*effective demand*) akan semakin berkurang karena pendapatan buruh juga semakin berkurang.

Akar permasalahan kemiskinan kaitannya dengan jumlah penduduk yang tinggi adalah keberadaan lapangan pekerjaan yang tidak bisa menampung kebutuhan angkatan kerja yang tercipta tersebut, sehingga terciptalah pengangguran yang berujung terhadap pembentukan kemiskinan. Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya (Sukirno, 2004: 28). Sedangkan menurut Mankiw (2006: 154), pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud, jika tidak maka akan terjadi pengangguran. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi tingkat pendapatan masyarakat dan dengan begitu akan memberikan dampak domino mengurangi tingkat kemakmuran. Semakin turun tingkat kemakmuran masyarakat karena pengangguran tentunya akan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan dan akan menimbulkan masalah lain yaitu kekacauan politik dan sosial (Sukirno, 2010: 24).

Penumpukan jumlah angkatan kerja tentu akan memberikan beban tambahan bagi perekonomian suatu negara apabila tidak disertai dengan perluasan dan penciptaan lapangan kerjanya. Jika lowongan kerja baru tidak bisa menampung semua angkatan kerja baru maka akan memperpanjang barisan pengangguran yang sudah ada (Dumairy, 1997: 68). Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika pengangguran dikatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan.

Kemiskinan sebagai masalah berskala nasional selalu dihadapi setiap pemerintahan. Kemiskinan terjadi dari akumulasi berbagai persoalan dan melibatkan banyak dimensi pokok. Menurut Makmun dalam Rusdarti (2013: 1-9) kemiskinan memiliki empat dimensi pokok, yaitu: (1) kurangnya kesempatan/*lack of opportunity*; (2) rendahnya kemampuan/*low of capabilities*; (3) kurangnya jaminan/*low level of security*; dan (4) ketidakberdayaan/*low of capacity or empowerment*. Bank Dunia sendiri menyebut bahwa kemiskinan sebagai hasil dari akuntabilitas dan responsibilitas institusi negara (World Bank 2001). Menyadari bahwa kemiskinan bersifat multi-dimensi dan mencerminkan akuntabilitas dan responsibilitas dari institusi negara, maka upaya pengentasan kemiskinan menjadi salah satu obyek tanggungjawab pemerintah.

Permasalahan kemiskinan menuntut adanya campur tangan pemerintah. Dengan adanya campur tangan pemerintah diharapkan permasalahan kemiskinan dapat ditanggulangi. Didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 sendiri sudah diamanatkan bahwa tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini berarti pemerintah bertanggung jawab terhadap masalah kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah masalah kemiskinan yang dialami oleh setiap warga negaranya.

Wujud konkrit dari adanya campur tangan pemerintah yaitu dengan adanya komponen pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk

meningkatkan laju investasi, kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi, dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata (Amalia, 2015: 183 - 189). Pengeluaran pemerintah yang digambarkan pada APBN pada prinsipnya bertujuan untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan bagi pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa data *time series* tahun 1986-2015. Data penelitian meliputi data jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah. Data tersebut diperoleh dari publikasi Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS), dan World Bank.

Teknik analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah analisis regresi. Metode yang digunakan adalah model regresi berganda (*Multiple Regression Model*). Model ini menggunakan program *Eviews 8* dengan prosedur metode OLS (*Ordinary Least Squares*). Model persamaan regresinya diformulasikan sebagai berikut:

$$POVERTY_t = \beta_0 + \beta_1 JP_t + \beta_2 P_t + \beta_3 PP_t + e$$

Keterangan:

POVERTY	= Kemiskinan
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi variabel bebas
JP	= Jumlah Penduduk
P	= Pengangguran
PP	= Pengeluaran Pemerintah
e	= <i>error</i>

Sehubungan dengan pemakaian metode OLS, untuk menghasilkan nilai parameter model penduga yang lebih sah, maka model asumsi klasik harus diuji. Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas. Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini digunakan alat uji statistik dengan Uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pengolahan data dengan program *Eviews 8* menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) menunjukkan bahwa hasil uji normalitas diperoleh probabilitas sebesar $0,137609 > 5\%$. Sehingga dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal.

Uji linearitas diperoleh probabilitas sebesar 0,4442 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi linieritas.

Uji multikolinearitas diperoleh hasil nilai VIF sebesar 19,91928 pada variabel JP (jumlah penduduk), 6,476631 pada variabel P (pengangguran), 8,516741 pada variabel PP (pengeluaran pemerintah). Sehingga $VIF > 10$ pada variabel JP (jumlah penduduk), artinya terdapat multikolinearitas pada model ini. Untuk mengatasinya data ditransformasi ke bentuk *Difference* dengan hasil nilai VIF sebesar 1,160322 pada variabel JP (jumlah penduduk), 1,205339 pada variabel P (pengangguran), 1,044920 pada variabel PP (pengeluaran pemerintah) < 10 artinya tidak terdapat multikolinearitas.

Uji autokorelasi yang telah dilakukan, didapatkan hasil nilai Prob.Obs*R-squared sebesar 0.0401. Karena Prob. Obs*R-squared lebih kecil dari tingkat alpha (0,05), maka model terindikasi terjadi autokorelasi. Untuk menyelesaikannya digunakan metode *Difference*, diperoleh hasil Prob. Obs*R-squared sebesar 0.8296, lebih besar dari tingkat alpha (0,05), maka model terindikasi tidak terjadi autokorelasi.

Uji heterokedastisitas didapatkan hasil nilai Prob Chi² sebesar 0.1380. Karena nilai Prob lebih besar dari tingkat alpha (0,05), maka model tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dari hasil uji statistik F di tabel 1 diperoleh bahwa nilai F_{hitung} sebesar 28.34252 dan probabilitas F sebesar 0,000000. Dalam taraf signifikansi 5% maka uji F signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Variabel jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap terjadinya kemiskinan.

Hasil perhitungan Koefisien determinasi atau *goodness of fit* di tabel 1 diperoleh angka sebesar 0,765824. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 76,58%, hal ini menunjukkan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 76,58%, sedangkan sisanya sebesar 23,42% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.

Berdasarkan pengolahan data dengan program *Eviews 8* menggunakan metode permodelan OLS (*Ordinary Least Square*) hasil penelitian dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Dependent Variable: LN_POVERTY
Method: Least Squares
Date: 08/31/17 Time: 18:23
Sample: 1986 2015
Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
JP	6.257149	3.040882	2.057676	0.0498
LN_P	0.194924	0.071167	2.738965	0.0110
LN_PP	-0.299375	0.060968	-4.910381	0.0000
C	20.05268	1.676617	11.96020	0.0000
R-squared	0.765824	Mean dependent var		17.28805
Adjusted R-squared	0.738804	S.D. dependent var		0.191387
S.E. of regression	0.097813	Akaike info criterion		-1.687955
Sum squared resid	0.248751	Schwarz criterion		-1.501129
Log likelihood	29.31933	Hannan-Quinn criter.		-1.628188
F-statistic	28.34252	Durbin-Watson stat		1.138489
Prob(F-statistic)	0.000000			

Tabel 1. Hasil estimasi model OLS

1. Pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan hasil estimasi model OLS di tabel 1 diperoleh koefisien regresi dari jumlah penduduk adalah arah positif sebesar 6,257149 dengan probabilitas sebesar 0,0498. Nilai signifikansi kurang dari tingkat signifikansi yang digunakan (0,05), hal ini berarti bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan tahun 1986-2015 di Indonesia.

Besaran koefisien yang bernilai positif pada 6,257149 menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penduduk sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan kemiskinan sebesar 6,25%. Adanya hubungan positif Antara jumlah penduduk dengan kemiskinan memberikan artian bahwa kenaikan jumlah penduduk membawa dampak terhadap kemiskinan di Indonesia. Artinya apabila jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat, maka dalam jangka panjang pengaruh tersebut akan menjadi faktor yang dapat meningkatkan kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Candra Mustika (2011) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Ada beberapa hal yang menjadikan jumlah penduduk menjadi penghambat pembangunan dan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Menurut Todaro (2000: 236) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Kenaikan jumlah penduduk tanpa dibersamai dengan kemajuan faktor-faktor perkembangan yang lain tidak akan menaikkan pendapatan dan permintaan. Dengan demikian, tumbuhnya jumlah penduduk justru akan menurunkan tingkat upah dan berarti pula memperendah biaya produksi. Selain itu menurut Malthus, kenaikan jumlah penduduk yang terus-menerus merupakan unsur yang perlu untuk menunjang tambahan permintaan, namun disisi lain kenaikan jumlah penduduk yang tinggi dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi yang imbasnya prospek pengurangan kemiskinan dan upaya pembangunan semakin jauh.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Restu Ratri Astuti (2015) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Beberapa hal yang menjadikan jumlah penduduk tidak berpengaruh negatif terhadap kemiskinan karena Penduduk sebagai pemacu pembangunan karena jumlah penduduk yang lebih besar adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada gilirannya akan merangsang output atau produksi agregat yang lebih tinggi lagi. Dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berarti tingkat kemiskinan akan turun (Todaro dan Smith, 2006).

2. Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 1 diperoleh hasil koefisien regresi dari pengangguran adalah arah positif sebesar 0,194924 dengan probabilitas sebesar 0,0110. Nilai signifikansi kurang dari tingkat signifikansi yang digunakan (0,05), hal ini berarti bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 1986-2015.

Besaran koefisien yang bernilai positif pada 0,194924 menunjukkan bahwa kenaikan pengangguran sebesar 1% akan diikuti oleh kemiskinan sebesar 0,19%. Adanya hubungan positif antara pengangguran dengan kemiskinan memberikan artian bahwa kenaikan atau penurunan pengangguran di Indonesia membawa dampak terhadap kemiskinan di Indonesia. Artinya, apabila pengangguran di Indonesia semakin meningkat, maka dalam jangka panjang pengaruh tersebut akan menjadi faktor yang dapat menaikkan kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fathul Mufid Cholili (2014) yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Pemilihan indikator pengangguran berdasar pada kenyataan bahwa indikator tersebut terkait langsung dengan tingkat pendapatan. Seseorang yang menganggur tentunya tidak memiliki pendapatan dari pekerjaan. Kebutuhan masyarakat yang banyak dan beragam membuat mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, hal yang dilakukan adalah bekerja untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud, jika tidak maka akan terjadi pengangguran. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi tingkat pendapatan masyarakat dan dengan begitu akan memberikan dampak domino mengurangi tingkat kemakmuran. Semakin turun tingkat kemakmuran masyarakat karena pengangguran tentunya akan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan dan akan menimbulkan masalah lain yaitu kekacauan politik dan sosial (Sukirno, 2010: 24).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Amalia (2012), bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Tidak berpengaruhnya pengangguran karena tingkat pendapatan keluarga yang tinggi sehingga mampu menopang biaya hidup bagi keluarga yang masih menganggur. Dengan demikian mereka hanya akan mencari pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan bidang maupun tingkat penghasilan yang diinginkan saja, dan tidak mau mencari pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang dan tingkat upah yang diharapkan.

3. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia

Hasil koefisien regresi dari pengeluaran pemerintah pada tabel 1 adalah arah negatif sebesar -0,299375 dengan probabilitas sebesar 0,0000. Nilai signifikansi kurang dari tingkat signifikansi yang digunakan (0,05), hal ini berarti bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan tahun 1986-2015 di Indonesia.

Besaran koefisien yang bernilai negatif pada 0,299375 menunjukkan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 1% akan diikuti oleh penurunan kemiskinan sebesar 0,29%. Adanya hubungan negatif antara pengeluaran pemerintah dengan kemiskinan memberikan artian bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah di Indonesia membawa dampak terhadap kemiskinan di Indonesia. Artinya apabila

pengeluaran pemerintah di Indonesia semakin meningkat, maka dalam jangka panjang pengaruh tersebut akan menjadi faktor yang dapat menurunkan kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Seri Jefry Adil Waruwu (2016) yang menyatakan bahwa belanja/pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan terjadi dari akumulasi berbagai persoalan dan melibatkan banyak dimensi pokok menuntut adanya campur tangan pemerintah yaitu dengan adanya komponen pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi, dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata (Amalia, 2015: 183 - 189). Pengeluaran pemerintah yang digambarkan pada APBN pada prinsipnya bertujuan untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan bagi pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Estomihi Hutabarat dan D. Sriyono juga menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur. Umumnya salah satu program prioritas pemerintah daerah adalah mengurangi kemiskinan, oleh karena itu tujuan desentralisasi adalah pemerintah dapat merespon lebih cepat terutama kebutuhan dasar penduduk miskin. Sepulveda dan Vazques (2010) menemukan penurunan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan dampak langsung dan tidak langsung dari adanya kebijakan desentralisasi fiskal dimana pemerintah daerah memiliki peranan penting melalui kebijakan yang terbuka dan langsung melalui pengeluaran pemerintah.

Menurut Dumairy (1996: 158) pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu tidak hanya untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian. Ini bukan berarti pemerintah ikut berbisnis, melainkan pemerintah harus berkontribusi menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum, termasuk penanggulangan kemiskinan agar tidak semakin parah dan dapat berkurang.

Menurut Noor (2015:251) kesejahteraan publik sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terjadi di masyarakat. Negara melalui pengeluaran pemerintah dapat memicu aktivitas ekonomi di masyarakat. Pengeluaran pemerintah, idealnya bukan besaran dan volumenya saja yang penting, namun yang juga perlu diperhatikan adalah ketepatan penggunaannya. Apakah dapat merangsang aktivitas ekonomi di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap kesejahteraan publik. Sebagai contoh, dalam menyusun rencana belanja/pengeluaran perlu dipikirkan juga dampak yang dapat ditimbulkan oleh belanja ini di masyarakat. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa pengeluaran negara/pemerintah berperan penting dalam pengentasan kemiskinan.

KESIMPULAN

1. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan pengaruh meningkatkan kemiskinan sebesar 6,25% dalam jangka panjang. Hal ini terjadi karena Kenaikan jumlah penduduk tidak dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor perkembangan yang lain. Dengan demikian, tumbuhnya jumlah penduduk justru akan menurunkan tingkat upah dan berarti pula menambah beban perekonomian. Pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga membuat prospek pengurangan kemiskinan dan pembangunan menjadi semakin jauh.
2. Jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan pengaruh peningkatan kemiskinan sebesar 0,19% dalam jangka panjang. Hal ini terjadi karena Kebutuhan masyarakat yang banyak dan beragam membuat mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, hal yang dilakukan adalah bekerja untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud, jika tidak maka akan terjadi pengangguran. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi tingkat pendapatan masyarakat dan dengan begitu akan memberikan dampak domino mengurangi tingkat kemakmuran. Semakin turun tingkat kemakmuran masyarakat karena pengangguran akan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan.
3. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan pengaruh penurunan kemiskinan sebesar 0,29% dalam jangka panjang. Hal ini terjadi karena pengeluaran pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di arahkan kepada aktivitas yang terjadi dalam masyarakat yang mempengaruhi kesejahteraan publik. Selain itu, pos yang menggunakan anggaran besar seperti subsidi-subsidi, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan dan sebagainya yang dinilai tidak produktif justru juga memeberikan sumbangsih terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Secara bersama-sama jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Jumlah penduduk dan pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Besarnya pengaruh yang disebabkan oleh ketiga variabel independen tersebut adalah sebesar 76,58%, sedangkan sisanya sebesar 23,42% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., madris & Abd. Rahman Razak. (2015). Pengaruh pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Analisis*, Desember 2015, Vol. 4, No. 2: Hal 183 - 189.
- Dumairy. (1997). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

- Estomihi Hutabarat & D. Sriyono. (2015). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002-2013)*. Jurnal. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Fathul M. C. (2014). *Analisis Pengaruh Pengangguran, (PDRB), dan (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia)*. Jurnal. Universitas Brawijaya, Malang.
- Fitri A. (2012). *Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001-2010*. *Econosains: Jurnal Online Ekonomi Dan Pendidikan* Vol 10 No 2.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mustika, C. (2011). *Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1990-2008*. *Jurnal Paradigma Ekonomika* vol 1 no 4. Universitas Jambi.
- Restu R. A. (2015). *Analisis Pengaruh Jumlah penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2004-2012*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Rusdarti dan Lesta Karolina Sebayang. (2013). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah*. *Jurnal Economia* (Volume 9, Nomor 1).
- Seri Jefry A. W. (2016). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1995-2004*. Skripsi. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Sri, M. (2010). *Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia*. *Jurnal Magister Ilmu Ekonomi*.
- Sukirno, S. (2004). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. (2010). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. S. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh*. Jakarta: Erlangga.
- World Bank, (2001). *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*.